

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BERLAKUNYA
INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR K.898/I/A/1975
TENTANG PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK
ATAS TANAH KEPADA SEORANG WARGA NEGARA
INDONESIA NON PRIBUMI**

Nama : Bagus Akbar Putra Perdana
Jurusan/Progam Studi: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M

ABSTRAK

Abstrak – Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Berlakunya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi, dengan membahas permasalahan diterapkannya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1975 yang memerintahkan agar tidak diberikan atau memberikan hak milik tanah kepada warga negara Indonesia non pribumi, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan hanya boleh diberikan hak guna bangunan atau Hak Pakai. Penelitian dengan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi ini dilihat dari substansinya seharusnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saat ini, akan tetapi Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1975 ini nyatanya masih belaku hingga saat ini. Instruksi ini juga tidak bisa di pertentangkan dengan peraturan perundang-undangan yang setelah tahun 1975, karena peraturan perundang-undangan setelah tahun 1975 tidak bisa ditarik mundur atau bersifat “*retroaktif*” serta masih belum ada pencabutan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, ini sudah tidak relevan dengan perkembangan pertanahan nasional di Indonesia. Produk hukum ini seharusnya sudah dicabut atau diperbaiki substansinya sehingga tidak menimbulkan diskriminasi antar golongan atau etnis tertentu. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya juga menghormati aturan hukum yang berlaku di dalam negara ini dengan patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Diskriminasi, Instruksi Daerah Istimewa Yogyakarta .

**JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE
VOCATIONAL INSTRUCTION THAT IS MADE BY THE
DEPUTY HEAD OF THE SPECIAL REGION OF
YOGYAKARTA NUMBER K.898 / I / A / 1975, THAT IS
CONCERNING ABOUT THE UNIFORMITY OF THE POLICY
FOR GRANTING RIGHTS TO THE NON-INDIGENOUS
INDONESIAN CITIZEN**

Name : Bagus Akbar Putra Perdana
Fakulty/Study Program: Law/Legal Studies
Supervisor(s) : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M

ABSTRACT

Abstract-This study is entitled "Juridical Review of the Implementation of the Vocational Instruction that is made by The Deputy Head of the Special Region of Yogyakarta Number K.898 / I / A / 1975, that is concerning about the Uniformity of the Policy for Granting Rights to the Non-Indigenous Indonesian Citizen", and this is discussing the issue about the instruction that had been implemented by the Deputy Head of the Special Region of Yogyakarta in 1975, who had ordered that no property granted or would be granted to non-indigenous Indonesian citizens, in the Special Region of Yogyakarta (DIY), and may only be granted for the rights of using the buildings. This research is focused with the contribution of law, by generating the concept and case that is approached, and has obtained a conclusion as follows: The Instruction from the Deputy Head of the Special Region of Yogyakarta, Number K898 / I / A / 1975, that is concerning about the Uniformity of Policy for Granting Rights to a Non-Indigenous Indonesian Citizen viewed from the substance should be contradictory with current legislation, but the 1975 Deputy Head of the Special Region of Yogyakarta, in fact, is still in existence today. This instruction also cannot be contested with the legislation after 1975, because the legislation after 1975 could not be withdrawn or was "retroactive" and there was still no revocation by other laws and regulations, and this was also considered as irrelevant to the national land development in Indonesia. This legal product should have been revoked or repaired the substance so it may not be causing any harm or discrimination between certain groups or ethnicities. The regional government of the Special Region of Yogyakarta should also respect the rules of the law that applied in this country by complying with all applicable laws and regulations.

Keywords : Discrimination, Instruction from the Special Region of Yogyakarta